

Judul : Negara butuh pagar pengaman kuat, DPR usulkan Pansus perbatasan
Tanggal : Sabtu, 07 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Negara Butuh Pagar Pengaman Kuat DPR Usulkan Pansus Perbatasan

Senayan mengusulkan pembentukan pansus lintas komisi guna membahas pengelolaan wilayah perbatasan negara. Persoalan ini butuh penanganan komprehensif karena menyangkut aspek ekonomi, sosial, keamanan, hingga kedaulatan negara.

ANGGOTA Komisi II Taufan Pawe menegaskan, selama ini pembahasan perbatasan masih didominasi satu komisi tertentu, sehingga banyak persoalan strategis tidak tertangani secara maksimal. Kondisi itu membuat berbagai program pembangunan di wilayah perbatasan berjalan lambat dan tidak terintegrasi.

"Idealnya persoalan pengelolaan perbatasan harus ditangani lintas komisi dalam bentuk pansus. Kalau hanya satu komisi, jujur saja sangat kewalahan," ujar Taufan dalam keterangannya, Kamis (5/2/2026).

Menurutnya, salah satu persoalan mendasar dalam pengelolaan perbatasan adalah minimnya perhatian masyarakat setempat. Padahal, masyarakat lokal merupakan pihak yang paling memahami

kondisi sosial, ekonomi, dan geografis wilayahnya. Itu membuat kebijakan perbatasan selalu berjarak dengan realitas lapangan.

"Akibatnya, berbagai program negara tidak mampu menjawab kebutuhan riil warga perbatasan," ungkap legislator Fraksi Partai Golkar itu.

Dia juga menyoroti kondisi ekonomi masyarakat perbatasan yang masih rentan. Di sejumlah wilayah, warga justru lebih bergantung pada negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan pokok karena perbedaan harga yang signifikan. Hal itu mencerminkan lemahnya kehadiran negara dalam menjamin akses ekonomi masyarakat perbatasan.

"Banyak warga perbatasan lebih tertarik belanja ke negara tetangga karena harganya lebih



Taufan Pawe

murah. Ini tanda negara belum hadir secara optimal," ujarnya.

Untuk menjawab persoalan itu, Taufan mendorong kebijakan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat perbatasan, salah satunya dengan subsidi kebutuhan dasar. Karena pembangunan perbatasan tidak boleh hanya berorientasi pada aspek fisik dan keamanan semata, tapi harus menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama.

"Negara harus hadir secara nyata. Subsidi dan perlindungan

ekonomi perlu dipikirkan agar masyarakat tidak terus terbebani," katanya.

Dalam hal pengelolaan, Taufan membandingkan perbatasan Indonesia dengan sejumlah negara tetangga yang telah menerapkan sistem pengawasan modern dan terintegrasi. Indonesia seharusnya mampu melakukan hal serupa jika memiliki keseriusan dan komitmen politik yang kuat.

"Untuk itu, pembentukan pansus lintas komisi jadi langkah strategis untuk menjawab semua tantangan itu," katanya.

Senada, anggota Komisi II DPR Komarudin Watubun menjelaskan, kompleksitas perbatasan tidak memungkinkan penanganan dilakukan secara sektoral. Ego antar-kementerian masih sering menghambat upaya penyelesaian masalah perbatasan. Akibatnya, berbagai persoalan strategis kerap berlarut-larut tanpa solusi tuntas. "Kalau hanya diurus satu komisi, tidak bisa. Ego sektoral masih sangat dominan," ujarnya.

Politikus PDIP itu mengi-

baratkan negara sebagai sebuah kebun yang harus memiliki pagar pengaman yang kuat. Tanpa pengamanan perbatasan yang memadai, berbagai ancaman akan mudah masuk ke dalam negeri. Lemahnya pengawasan juga berpotensi memicu berbagai kejahatan lintas negara.

"Mulai dari penyelundupan, perdagangan ilegal, pertambangan ilegal, hingga peredaran narkoba yang mengancam keamanan nasional, dan merusak masa depan generasi muda," katanya.

Komarudin menyinggung wilayah perbatasan Papua sebagai salah satu contoh kawasan strategis yang membutuhkan perhatian serius. Letaknya yang berbatasan langsung dengan negara lain dan jalur internasional membuat kawasan itu rawan terhadap berbagai dinamika geopolitik.

"Pengalaman di Papua harus menjadi pelajaran bagi pengelolaan perbatasan di wilayah lain. Negara tidak boleh terlambat merespons perubahan lingkungan strategis global," tandasnya. ■ PYB